

PETA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Soeharjoto

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440, Indonesia
E-mail: ryoto16@yahoo.com

Abstract

Purpose of this study is to find out about financial independence map of the districts and cities in Central Java. Which using descriptive statistics, with IKF, DDD and KKD approaches. IKF approach still has intervention from the central government such as a budget assistance, while the DDD and KKD approaches just rely on the ability of the region itself in the form of PAD. Results of financial independence map in Central Java Province with the IKF approach were obtained: 3 cities at medium category, 2 cities at low category and 1 city at very low category, while all of 29 districts were in the very low category. DDD and KKD obtained the same results, there is one city in "fair" category, three city at "moderate" category, and two cities at "minus" category, while for 23 districts are at minus category and one district at very minus category.

Keywords: IKF, DDD, KKD, PAD, APBD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilakukan secara demokratis, partisipatif, adil dan merata dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerahnya, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan cerminan keseriusan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah memiliki makna adanya kebebasan daerah untuk mandiri dan dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat (Adisubrata, 2003). Keberhasilannya, dapat terwujud dengan cara menggali sumber daya potensial yang dimilikinya. Aktivitas ini, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan keuangan daerahnya berkaitan dengan besar kecilnya PAD yang diperoleh.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, banyak dianggap

sebagai penyebab lambannya pembangunan daerah. Kesemuanya, tidak terlepas dari adanya jurang ketimpangan antara daerah yang semakin membesar. Daerah yang belum mandiri secara keuangan merupakan cerminan dari ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Calvin dan Yuliana, 2016). Padahal, peran pemerintah daerah sendiri yang justru dapat menentukan keberhasilan pembangunannya. Kebijakan ini, diharapkan akan memunculkan kesempatan yang besar bagi daerah untuk dapat mandiri secara finansial.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kesiapan daerah itu sendiri, sehingga ketergantungan daerah terhadap pusat akan semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri. Untuk itu, perlu adanya beberapa aspek yang perlu dipersiapkan agar dapat tercapai kemandirian keuangan daerah, yakni dengan mempersiapkan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan pra sarana. Keuangan

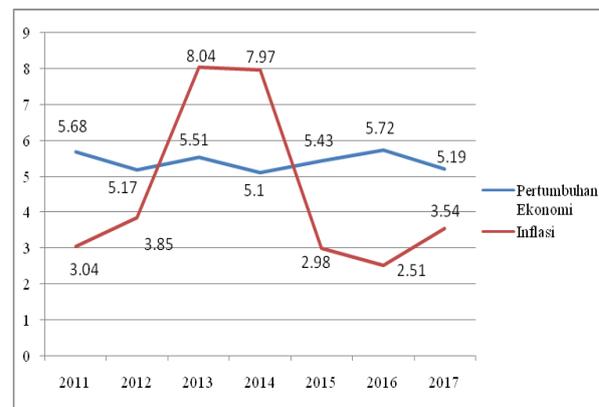
merupakan aspek penting yang menjadi dasar untuk dijadikan indikator nyata kemampuan daerah dalam keberhasilan otonominya.

Indonesia dalam melakukan desentralisasi fiskal lebih berorientasi pada adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan sumber penerimaan negara dari pusat ke daerah, sehingga daerah akan memperoleh keleluasan untuk mengatur anggarannya sendiri. Lebih dominannya konsep desentralisasi dibandingkan dengan dokonsentrasi karena adanya pertanggungjawaban yang lebih bersifat horizontal dari pada vertikal, serta adanya kewenangan pelimpahan keuangan yang secara utuh terhadap daerah (Rochjafi,2006). Bahl dan Linn (2006), mengungkapkan bahwa dalam otonomi daerah perlu diberlakukannya desentralisasi fiskal karena dengan adanya strata yang lebih pendek akan memperoleh hasil yang lebih optimal, dalam hal pelayanan publik. Adanya kecenderungan pemerintah daerah lebih loyal terhadap daerahnya, akan berdampak pada semakin tanggapnya pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah, serta akan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang letaknya strategis dengan kondisi alam dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini, merupakan modal utama dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah terutama untuk inovasi dalam menggali potensi daerahnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara wilayah kota dan kabupaten yang secara administratif, infrastruktur dan suprastruktur yang berbeda, akan berdampak pada hasil pelaksanaan desentralisasi fiskalnya pun akan berbeda.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada 2011-2017 dengan rata-rata sebesar 5,4 persen dan inflasi sebesar 4,57 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini, merupakan adanya kontribusi dari pengembangan di sektor riil (Soeharjoto, 2018). Namun, investasi yang tidak ditunjang dengan kesiapan sumber daya manusia tidak merubah kondisi perekonomiannya (Usman, 2018). Dalam menjalankan perekonomian perlu memperhatikan dampak lingkungannya agar

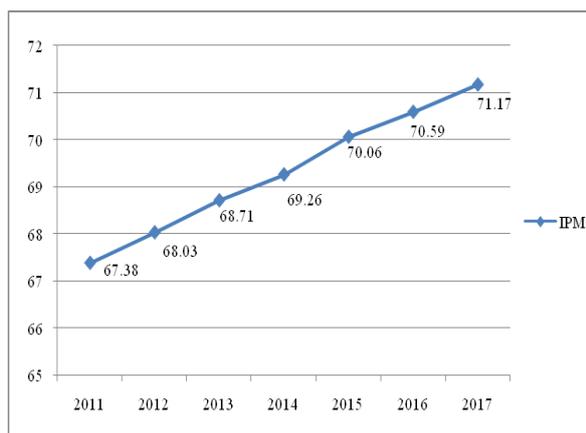
perekonomian dapat berjalan secara berkesinambungan (Arafah, 2018). Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam upaya menjaga jangan sampai terjadi adanya asimetri informasi (Muna dan Harris, 2018). Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada 2016 dan terendah di 2014, dengan kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi di Blora sebesar 7,68 persen dan terendah di Cilacap sebesar 3,44 persen. Rata-rata inflasi tertinggi pada 2013 dan terendah pada 2016, dengan daerah yang memiliki rata-rata inflasi tinggi adalah Kabupaten Cilacap sebesar 5,5 persen dan terendah di Kota Tegal sebesar 3,84 persen.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Provinsi Jawa tengah, Pada 2011-2017 (Persen)

Sumber: BPS

Sumber daya manusia yang handal merupakan modal utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indikator yang digunakan untuk kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata trend pertumbuhan IPM di Povinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, yang pada 2011-2017 sebesar 0,91 persen dengan rata-rata IPM sebesar 69,31. Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada 2015 sebesar 1,16 persen dan terendah pada 2016 sebesar 0,76 persen. Kota Semarang pada 2017 memiliki IPM tertinggi sebesar 8,01 dan terendah di kabupaten Pemasang pada 2011 sebesar 59,66.



Gambar 2. IPM di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2011-2017

Sumber: BPS

Pembangunan ekonomi dalam pelaksanaannya akan merubah siklus, dari besarnya peran pemerintah akan beralih ke swasta. Dalam proses pembangunan, terdapat perubahan karena adanya peningkatan peran dari investasi swasta terhadap pendapatan daerah, sedangkan peran pemerintah justru akan semakin menurun (Rostow, 1959) dan Musgrave, 1969). Adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat secara relatif, akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran pemerintah (Wagner, 1893). Adapun dampaknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, walaupun tarif pajak yang dikenakan tidak berubah (Peacock dan Wisemen, 1979).

Penelitian yang terkait dengan kapasitas fiskal daerah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun hasilnya terdapat kecenderungan yang sama. Rusman, dkk (2018), mengungkapkan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah di Kota Palu masih belum mandiri. Kamaroellah (2017), mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Pamekasan masih sangat kurang. Melalolin (2016), menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masuk kategori cukup mandiri. Wijaya, dkk (2015), menemukan bahwa kemampuan fiskal di Kota Jambi kecil, sehingga ketergantungannya terhadap pemerintah

pusat sangat tinggi. Widyaningsih (2015), dengan temuan bahwa walaupun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Pontianak adanya kecenderungan yang semakin meningkat, tetapi kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih kecil, sehingga perlu banyak bantuan dana dari pemerintah pusat. Sari (2014), mengungkapkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah tertinggal sangat kurang. Sastiani dan Makmur (2014), menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Jawa Timur hampir 90 persen masuk kategori sangat rendah.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Apabila daerah memiliki kapasitas fiskal yang baik menandakan bahwa daerah tersebut sudah dapat dikatakan mampu dalam mengelola keuangan daerahnya, terutama yang berkaitan dengan PAD. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan PAD menunjukkan semakin dewasanya daerah, karena sudah mampu dan dapat mengelola sumber-sumber potensi di daerahnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peta kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah. Adapun pendekatannya melalui tiga tahapan yakni melakukan pemetaan kapasitas fiskal kemudian, derajat desentralisasi, dan kemampuan keuangan daerah. Pendekatan pertama dapat melihat kondisi fiskal daerah secara umum karena masih adanya intervensi dari pemerintahan pusat, sedangkan pendekatan kedua dan ketiga merupakan kemampuan daerahnya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian peta kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah menggunakan metode statistik deskriptif. Pendekatan yang digunakan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), dan Derajat Desentralisasi Daerah (DDD) pada 2010-2017, dengan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, Republik Indonesia (DJPK). Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan

membagi dua wilayah administratif sesuai dengan karakteristiknya yakni kabupaten dan kota.

Peta kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal (IKF) daerah. Adapun tahapannya adalah mencari kapasitas fiskal, membuat indeks kapasitas fiskal, dan mengkategorikan kapasitas fiskal berdasarkan Permen No. 119/PMK. 07/2017. Derajat desentralisasi daerah (DDD) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya (Bisma, 2010). Kemampuan keuangan daerah (KKD) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi di daerahnya (Sularso, 2011). Derajat desentralisasi fiskal dan kemampuan keuangan daerah dengan mencari rasio kemudian mengkategorikan berdasarkan Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991).

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD):

$$KFD = \frac{\text{Penerimaan umum APBD} - (\text{Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya} + \text{Belanja})}{\dots}$$

$$IKF = \frac{\text{Kapasitas fiskal daerah}}{\sum \text{Kapasitas Fiskal}/n} \times 100$$

Kategori indeks kapasitas fiskal untuk kabupaten dan kota berdasarkan Permen No. 119/PMK. 07/2017:

1. $IKF \geq 2,05$ merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi.
2. $1,14 \leq IKF \leq 2,05$ merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal daerah tinggi.
3. $0,72 \leq IKF \leq 1,14$ merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal daerah sedang.
4. $0,53 \leq IKF \leq 0,72$ merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal daerah rendah.
5. $IKF \leq 0,53$ merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat rendah.

Derajat Desentralisasi Daerah:

$$\text{Rasio DDD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Kategori Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan

Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991):

1. $DDD > 50$ persen memiliki kemampuan keuangan daerah sangat baik.
2. $40 \text{ persen} < DDD \leq 50 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah baik.
3. $30 \text{ persen} < DDD \leq 40 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah cukup.
4. $20 \text{ persen} < DDD \leq 30 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah sedang.
5. $10 \text{ persen} < DDD \leq 20 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah kurang.
6. $DDD < 10$ persen memiliki kemampuan keuangan daerah sangat kurang.

Kemampuan Keuangan Daerah:

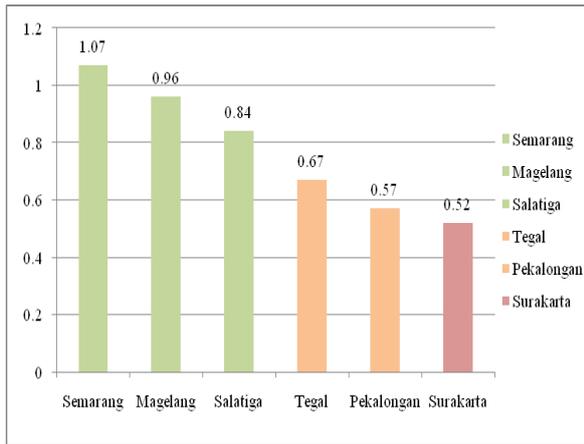
$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Kategori Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991):

1. $KKD > 50$ persen memiliki kemampuan keuangan daerah sangat baik.
2. $40 \text{ persen} < KKD \leq 50 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah baik.
3. $30 \text{ persen} < KKD \leq 40 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah cukup.
4. $20 \text{ persen} < KKD \leq 30 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah sedang.
5. $10 \text{ persen} < KKD \leq 20 \text{ persen}$ memiliki kemampuan keuangan daerah kurang.
6. $KKD < 10$ persen memiliki kemampuan keuangan daerah sangat kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

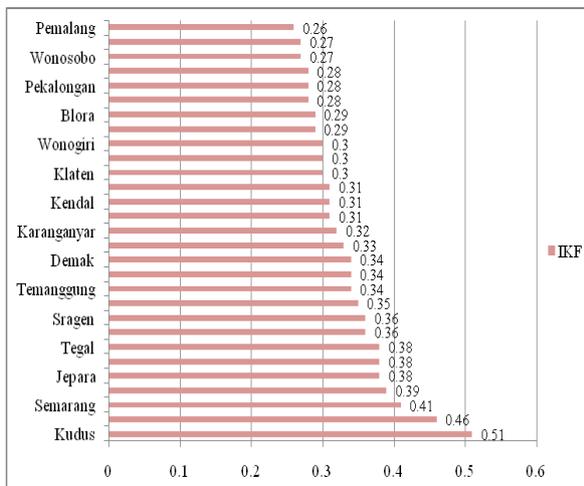
Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) daerah yang masuk dalam kategori tinggi dan sedang masih di dominasi oleh kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan IKF kota sebesar 23,67 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kota Surakarta sebesar 56,41 persen dan terendah di Salatiga sebesar 5,19 persen. Kota di Jawa Tengah, memiliki rata-rata IKF sebesar 0,77 dengan IKF daerah yang sedang di Semarang, Magelang dan Salatiga. IKF rendah berada di Tegal dan Pekalongan. Kota yang memiliki IKF sangat rendah adalah Surakarta.



Gambar 3. Indeks Kapasitas Fiskal Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

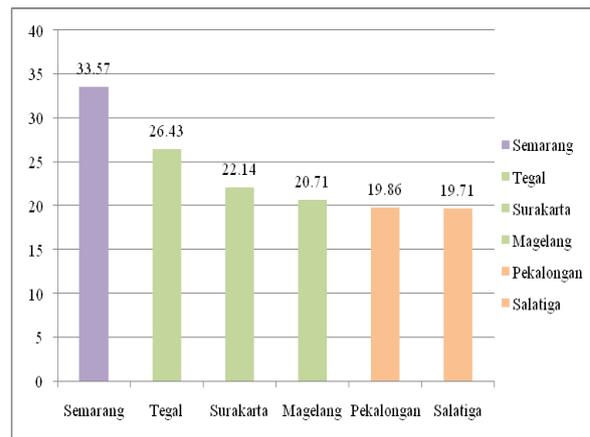
Keseluruhan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori IKF sangat rendah, dengan rata-rata pertumbuhan IKF sebesar 181,15 persen, yang pertumbuhannya tertinggi di Pemalang sebesar 548,56 persen dan yang terendah di Kudus sebesar 25,03 persen. Rata-rata IKF kabupaten yang masuk kategori sangat rendah sebesar 0,34, yang meliputi Kudus, Cilacap, Semarang, Banyumas, Jepara, Sukoharjo, Tegal, Pati, dan Sragen, Brebes, Temanggung, Boyolali, Demak, Grobogan, Karanganyar, Magelang, Kendal, Kebumen, Klaten, Purworejo, Wonogiri, Batang, Blora, Banjarnegara, Pekalongan, Rembang, Wonosobo, Purbalingga, dan Pemalang.



Gambar 4. Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Sangat Rendah

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017
Sumber: DJPK (Data Diolah)

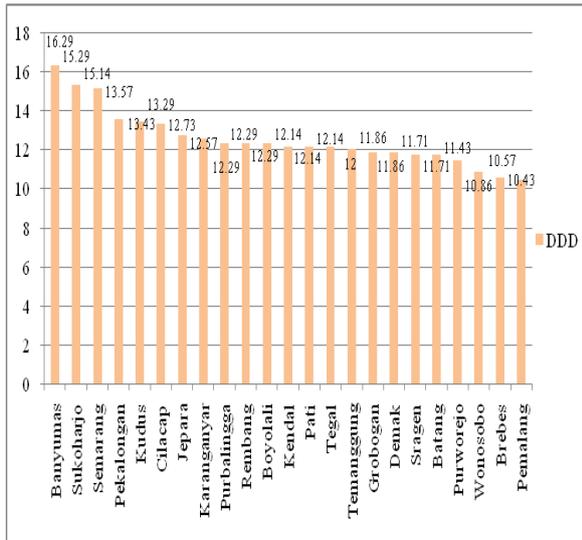
Rata-rata Derajat Desentralisasi Daerah (DDD) kota di Provinsi Jawa tengah sebesar 23,74 dengan kontribusi terbesar di Semarang dan yang terkecil di Salatiga. Kota Semarang masuk kategori cukup. Kota yang masuk kategori sedang adalah Tegal, Surakarta, dan Magelang. Kota Pekalongan dan Salatiga masuk kategori kurang.



Gambar 5. Derajat Desentralisasi Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Hasil Data Olahan)

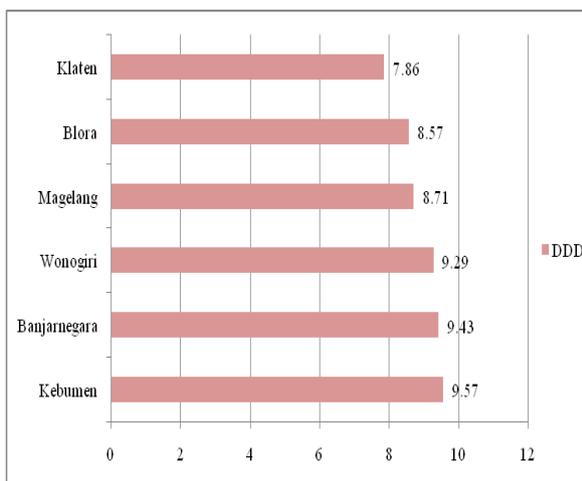
Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 Kabupaten yang masuk Kategori DDD kurang, dengan rata-ratanya 12,52, yang nilai tertinggi di Banyuwangi dan yang terendah di Pemalang. Kabupaten yang masuk kategori ini adalah Banyumas, Sukoharjo, Semarang, Pekalongan, Kudus, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Purbalingga, Rembang, Boyolali, Kendal, Pati, Tegal, Temanggung, Grobogan, Demak, Sragen, Batang, Purworejo, Wonosobo, Brebes, dan Pemalang.



Gambar 6. Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten yang Masuk Kategori Kurang di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

DDD masuk kategori sangat kurang di Provinsi Jawa Tengah terdapat di 6 kabupaten yang rata-ratanya 8,91, dengan nilai tertinggi di Kebumen dan yang terendah di Klaten. Kabupaten yang masuk kategori ini meliputi Kebumen, Banjarnegara, Wonogiri, Magelang, Blora, dan Klaten.

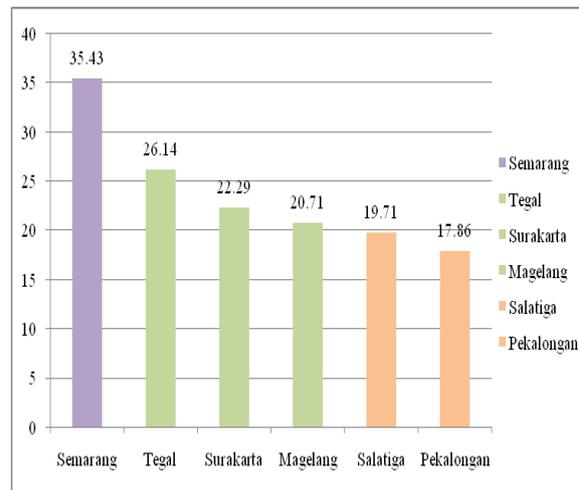


Gambar 7. Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten yang Masuk Kategori Sangat Kurang di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

Kota di Provinsi Jawa tengah memiliki KKD

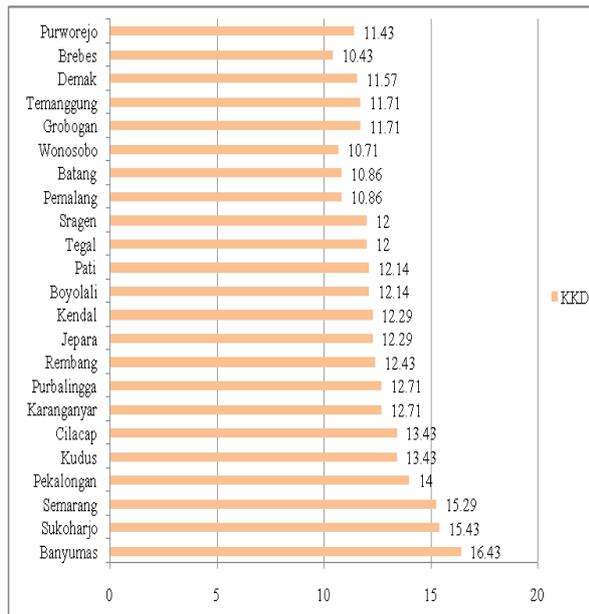
yang beragam dengan rata-rata 23,69 yang nilai tertinggi di Semarang dan dan terendah di Pekalongan. Kategori KKD cukup dimiliki Semarang. Kota Tegal, Surakarta, dan Magelang masuk kategori KKD sedang. KKD yang kurang terdapat 2 kota, yakni Salatiga dan Pekalongan.



Gambar 8. Kemampuan Keuangan Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

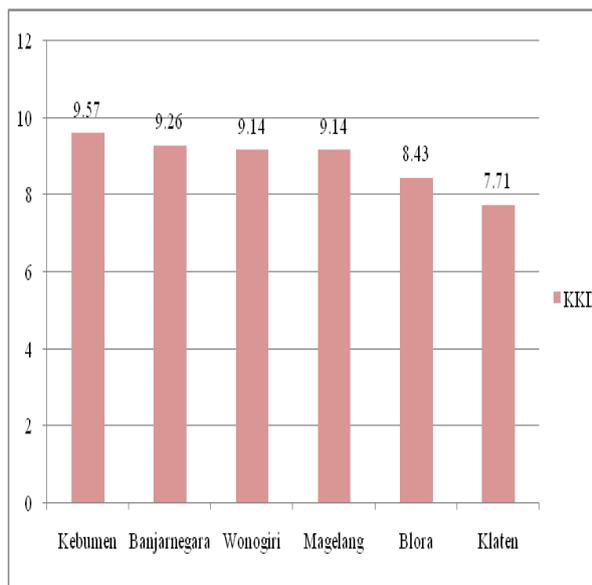
Provinsi Jawa tengah memiliki 23 Kabupaten dengan status KKD kurang. Rata-rata KKD-nya 12,52 dengan KKD tertinggi di Banyumas dan yang terendah di Brebes. Kabupaten yang masuk kategori ini meliputi Banyumas, Sukoharjo, Semarang, Pekalongan, Kudus, Cilacap, Karanganyar, Purbalingga, Rembang, Jepara, Kendal, Boyolali, Pati, Tegal, Sragen, Pemalang, Batang, Grobogan, Temanggung, Wonosobo, Demak, Brebes dan Purworejo.



Gambar 9. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten yang Masuk Kategori Kurang di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

KKD kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kategori sangat kurang ada 6 kabupaten. Kabupaten tersebut, memiliki rata-rata KKD 8,88 dengan nilai tertinggi di Kebumen dan yang terendah di Klaten. Kabupaten yang termasuk dengan status ini, meliputi Kebumen, Banjarnegara, Wonogiri, Magelang, Blora, dan Klaten.



Gambar 10. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten yang Masuk Kategori Sangat Kurang di

Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Sumber: DJPK (Data diolah)

Hasil pendekatan IKF di Provinsi Jawa Tengah antara kota dan kabupaten terlihat adanya ketimpangan kemandirian keuangan daerah. Di kota ada sebanyak 8,57 persen masuk kategori sedang, 5,71 persen kategori rendah, 2,86 persen kategori sangat rendah, sedangkan kabupaten sebesar 82,86 persen masuk kategori sangat rendah.

Tabel 1. Kategori IKF Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Kategori	IKF	Kota	Kabupaten
1.	Sangat Tinggi	-	-
2.	Tinggi	-	-
3.	Sedang	3	-
4.	Rendah	2	-
5.	Sangat Rendah	1	29

Sumber: DJPK (Data Diolah)

DDD dan KKD diperoleh hasil yang sama. Kota memiliki kategori cukup sebanyak 2,86 persen, sedang sebanyak 8,57 persen, kurang sebanyak 5,71 persen, sedangkan kabupaten dengan kategori kurang sebanyak 65,72 persen dan sangat kurang sebanyak 17,14 persen.

Tabel 2. Kategori DDD dan KKD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pada 2010-2017

Kategori	DDD dan KKD	Kota	Kabupaten
1.	Sangat Baik	-	-
2.	Baik	-	-
3.	Cukup	1	-
4.	Sedang	3	-
5.	Kurang	2	23
6.	Sangat Kurang	-	6

Sumber: DJPK (Data Diolah)

SIMPULAN DAN SARAN

Peta kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan IKF, DDD, dan KKD yang memperoleh hasil yang berbeda. Pendekatan IKF

masih terdapatnya intervensi dari pemerintah pusat berupa bantuan anggaran sedangkan pendekatan DDD dan KKD hanya mengandalkan kemampuan daerahnya sendiri berupa PAD. Hasil peta kemandirian keuangan daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan IKF diperoleh kategori sedang (3 kota), rendah (2 kota), dan sangat rendah (1 kota), sedangkan untuk kabupaten semuanya masuk kategori sangat rendah (29 kabupaten). DDD dan KKD memperoleh hasil yang sama, untuk kota masuk kategori cukup (1 kota), sedang (3 kota), dan kurang (2 kota), sedangkan untuk kabupaten masuk kategori kurang (23 kabupaten) dan sangat kurang (1 kabupaten).

Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah mengupayakan agar tidak terjadi ketimpangan jauh antara kota dan kabupaten. Untuk kota sendiri masih terjadi ketimpangan dan masih belum masuk kategori yang optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemendiannya. Kabupaten sebaiknya dapat meningkatkan kategorinya dan apabila sudah dapat dikatakan mapan dapat diubah statusnya menjadi kota agar aktivitas daerahnya dapat lebih optimal lagi. Agar Provinsi Jawa tengah dapat mandiri, pemerintah daerah sebaiknya memfokuskan pada kemampuannya sendiri, akan melakukan inovasi terhadap PAD dan agar terjadinya pembangunan yang *sustainable* dalam menggali potensi daerah dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Willy., Lucky Nugroho, Rowlan Takaya, Soeharjoto Soekapdjo. 2018. Marketing Strategy for Renewable Energy Development In Indonesia Context Today. International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 8, Issue 5.
- Adisubrata, W. S. 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi). CV. Aneka Ilmu. Semarang.
- Bisma, I Dewa Gde. Dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, GeneÇ Swara Edisi Khusus. Vol. 4, No. 3.
- Bahl, Roy. and Johannes Linn. 2012. *Urban Publik Finance In Developing Countries*, Oxford University Press, New York.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta
- Calvin, Yesdi Christian. dan Lia Yuliana. 2016. Deteksi Ilusi Fiskal Pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013. Jurnal Ilmiah Widya. Vol. 3, No. 3.
- Kamaroellah, R. Agoes. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa. Vol. 14. No. 1.
- Muna, Biaini Naeli dan Luthfi Haris. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Penelitian Persepsi Pengelola Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU). Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 6, No. 1.
- Melalolin, Mersy Lenora., Amran T. Naukoko, dan Agnes L. Ch. P. Lapihan. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16. No. 3.
- Musgrave, Richard A. 1969. Cost-Benefit Analysis and the Theory of Public Finance. Journal of Economic Literature. vol. 7, issue 3
- Peacock, A. T., Wiseman, J. 1979. Approach to the analysis of Government expenditure growth. *Public Finance Quarterly*. 7.
- Rusman, Liswan., Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah. 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Dalam Membiayai Pengeluarannya. Jurnal

- Katalogis. Vol. 6. No. 4.
- Rochjadi, Achmad. 2006. Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Rostow, W. W. 1959. The Stages of Economic Growth. *The Economic History Review*. Vol. 12, Issue 1
- Soekapdjo, Soeharjoto., Lucky Nugroho, Ahmad Badawi, Wiwik Utami. 2018. Bad debt issues in Islamic bank: macro and micro influencing (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*. Vol. 4, Issue 1.
- Sistiana, Mega. Dan M. Hadi Makmur. 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12, No. 4.
- Sari, Rafika. 2014. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 5, No. 1.
- Sularso, Havid. Dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol 1, No. 2.
- Usman, Bahtiar., Syofriza Syofyan, Lucky Nugroho, Soeharjoto. 2018. Foreign Bank Penetration and Its Impact on Banking Industries. *Eurasian Journal of Economics and Finance*. Vol. 6(1).
- Widyaningsih, Atria Tiffany. 2015. Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak. *e Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 3.
- Wijaya, Dito., Haryadi, dan Zulgani. 2015. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 3. No. 1.
- Wagner, Adolph. 1893. *Grunlegung der Politischen Okonomie*. 3rd ed. Leipzig: C. F. Winter.
- www.bps.go.id
- www.djpk.kemenkeu.go.id